

	News Title : Bappebti Beri Batas Akhir Pemenuhan Persyaratan untuk Calon Pedagang Fisik Kripto, Apa Komentar Aspakrindo-ABI?	
	Media Name : Theiconomics.com	Journalist : -
	Publish Date : 26 August 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Kasan (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti))	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : News	Topic : Bappebti Beri Batas Pendaftaran Izin Pedagang Kripto

Bappebti Beri Batas Akhir Pemenuhan Persyaratan untuk Calon Pedagang Fisik Kripto, Apa Komentar Aspakrindo-ABI?

August 26, 2024
Editor: Redaksi

[f Share](#) [X Tweet](#) [Share](#) [Share](#) [Share](#)



Ilustrasi Bitcoin

Iconomics - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memberikan batas waktu akhir bagi pemenuhan syarat sebagai pedagang fisik aset kripto. Pengaturan tersebut termaktub dalam Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Salah satu poin pentingnya adalah batas waktu bagi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) untuk memenuhi persyaratan dan mendapatkan izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang sah, yakni paling lambat pada tanggal 16 Oktober 2024.

Kepala Bappebti, Kasan menegaskan pentingnya penerapan peraturan ini untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha di industri kripto di Indonesia beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Saat ini, terdapat 2 perusahaan yang sudah mendapatkan izin PFAK dan 13 CPFAK yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) sedang berproses mendapatkan persetujuan menjadi PFAK.

"Peraturan ini bukan hanya untuk melindungi investor, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem perdagangan kripto yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Kami memberikan waktu yang cukup bagi para calon pedagang untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Setelah 16 Oktober 2024, tidak ada toleransi bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban ini," tegas Kasan dalam keterangannya.

Baca Juga : [Anggota Komisi XI Minta Gubernur BI Awasi Aset Kripto](#)

Menurut Perba 8 Tahun 2024, CPFAK yang telah memiliki tanda daftar diwajibkan untuk mengajukan permohonan persetujuan sebagai PFAK kepada Bappebti paling lambat satu bulan setelah Bursa Berjangka dan Lembaga Klining Berjangka mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti. Jika CPFAK tidak memenuhi syarat atau gagal mendapatkan persetujuan hingga batas waktu yang telah ditetapkan, maka tanda daftar mereka akan dibatalkan dan tidak berlaku lagi.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain & Pedagang Aset Kripto Indonesia (**Aspakrindo-ABI**), Yudhono Rawis mengatakan peraturan baru ini akan membantu menyaring pemain yang serius dan berkomitmen untuk mematuhi regulasi, sehingga menciptakan pasar yang lebih stabil dan aman bagi semua pihak.

"Kami mendukung penuh langkah Bappebti ini karena dapat meningkatkan kredibilitas industri kripto di Indonesia. Ini juga memberikan kepastian bagi investor bahwa mereka bertransaksi di pasar yang diawasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas Yudho.

Yudho menekankan bahwa keberadaan peraturan yang jelas dan tegas sangat penting dalam mendorong pertumbuhan industri kripto yang sehat. Menurutnya, regulasi yang ketat ini tidak hanya melindungi investor dari potensi risiko yang mungkin timbul akibat praktik yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga mendorong inovasi di sektor kripto.

Baca Juga : [Aset Kripto Lokal Tumbuh, CEO Indodax Berikan Catatan Penting](#)

Yudho berharap bahwa dengan diterapkannya Perba 8 Tahun 2024 ini akan semakin banyak pelaku usaha kripto yang mengambil langkah proaktif untuk mematuhi peraturan dan menjaga integritas industri.

"Ke depan, kami optimis bahwa Indonesia dapat menjadi salah satu pemain utama dalam industri kripto global, dengan didukung oleh regulasi yang kuat dan industri yang solid," tutupnya.